

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyajian, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

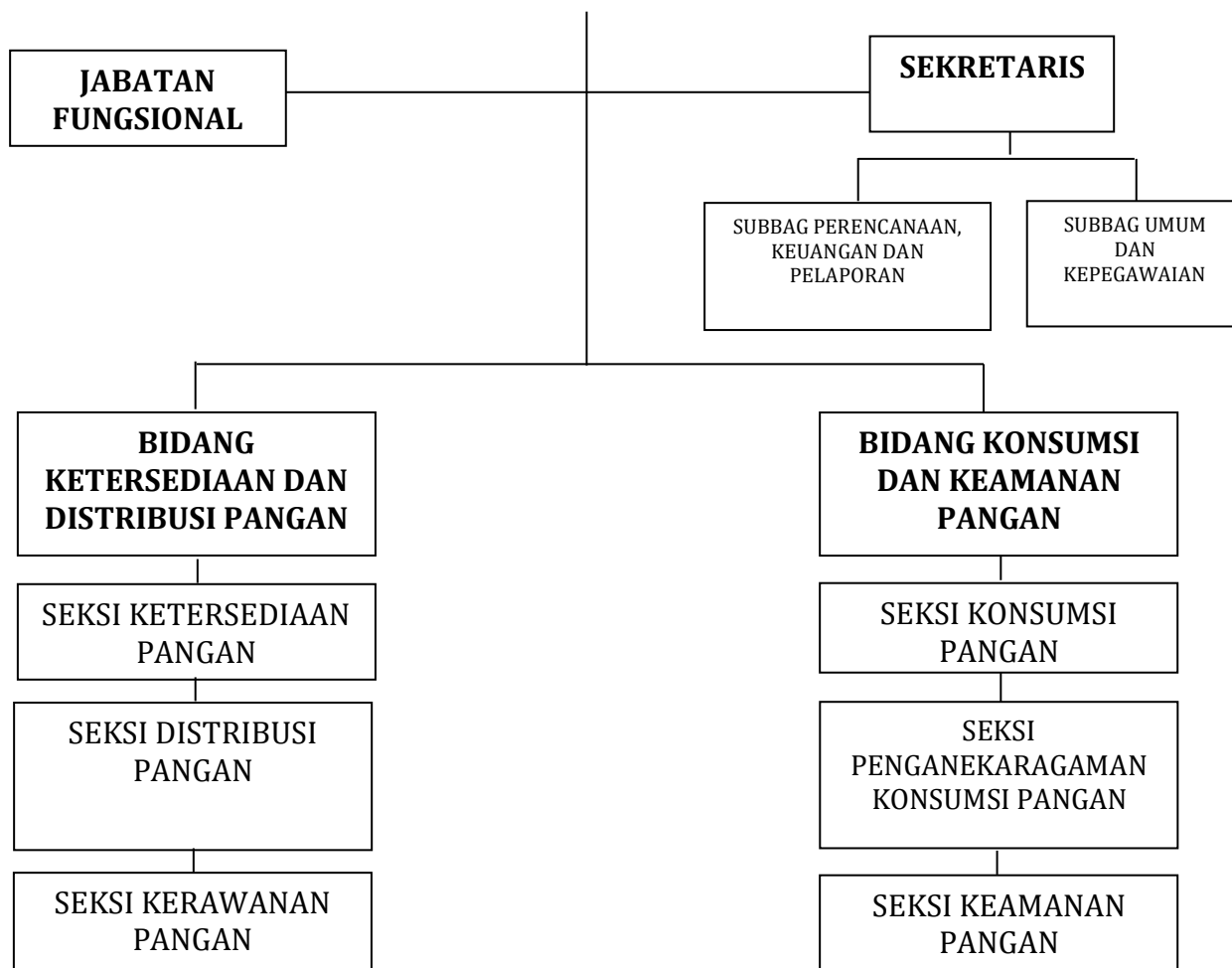
Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas daerah dalam RPJMD 2016-2021 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, serta percepatan penganeekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap Negara akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Ketahanan pangan disamping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga merupakan pilar bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah dan masyarakat sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralisasi pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan inisiator, fasilitator serta agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya nasional dan daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah. Kedudukan Dinas Pangan merupakan perangkat daerah di bidang ketahanan pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas pejabat Eselon II.a yaitu Alfis Basyir, S.E., M.Hum. yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2018 atas dasar kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan evaluasi kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja Dinas Pangan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan serta sejauhmana pelaksanaan program/kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Struktur Organisasi

KEPALA DINAS



1.2. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Badan

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan Dinas Pangan serta melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Dinas Pangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

b. Sekretaris

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, membagi tugas, member petunjuk, menilai dan menganalisis pelaksanaan kegiatan di sekretariat meliputi urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan dan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pangan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tertib administrasi di lingkungan Dinas Pangan.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian badan dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas pokok dan fungsi mengonsep rencana, membagi tugas, member petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, meneliti, memantau dan mengevaluasi penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisir, data dari masing-masing bidang, menyiapkan perumusan program perencanaan, penyajian data, informasi, sinkronisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan dalam lingkup Badan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

c. Bidang – bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu

1. Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan membawahi :

Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan konsep rumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, member petunjuk, mengatur dan menilai pelaksanaan kegiatan Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup urusan dan tugas Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan berdasarkan peraturan dan ketentuan. Bidang ini membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan

Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisis data fasilitas distribusi dan akses pangan, identifikasi infrastruktur distribusi pangan, pengembangan infrastruktur dan koordinasi pencegahan penurunan akses pangan dan meningkatkan akses pangan masyarakat berdasarkan ketentuan

yang berlaku agar tugas pengumpulan dan pengolahan data terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b) Sub Bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan

Sub Bidang Kerawanan dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menganalisis data distribusi pangan dan identifikasi ketersediaan pangan, identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat serta pembinaan cadangan pangan masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tugas pengumpulan dan pengolahan data terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan, membawahi :

Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan serta melakukan koordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan konsumsi masyarakat yang mengacu kepada Pola Konsumsi Pangan berdasarkan ketentuan. Bidang ini membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu :

a) Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan

Sub Bidang Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan, menyusun rencana, menganalisa, membina, memantau dan mengevaluasi konsumsi pangan, serta menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, dan mengkoordinasikan dengan tugas sub bidang pola konsumsi pangan berdasarkan peraturan.

b) Sub Bidang Teknologi dan Keamanan Pangan

Sub Bidang Teknologi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan kebijakan teknis pengembangan teknologi dan keamanan pangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan teknologi dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3. KEPEGAWAIAN

Berdasarkan kondisi per Januari 2018, jumlah aparatur Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 27 orang, Golongan IV sebanyak 1 orang, Golongan III sebanyak 20 orang dan Golongan II sebanyak 7 orang.

Tabel 3.1.1.

No	Status PNS	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	20	74,07
2.	Tenaga Sukarela	7	25,93
Jumlah		27	100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa aparatur belum seluruhnya berstatus PNS, sehingga uraian selanjutnya tentang kondisi pegawai difokuskan hanya pada PNS sebanyak 20 orang.

a. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Dari 20 PNS Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di dominasi oleh pegawai golongan III yang menandakan bahwa rata-rata latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerja, umumnya sudah mencukupi syarat yang dibutuhkan dalam upaya optimalisasi kinerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	IV	4	20,00
2.	III	14	70,00
3.	II	2	10,00
Jumlah		20	100,00

b. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, maka status pendidikan sarjana lebih mendominasi, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 2 (S2)	5	25
2.	Starata 1 (S1)	10	50
3.	Diploma III (DIII)	-	0
4.	SLTA	5	25
Jumlah		20	100

1.4. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Adapun yang menjadi isu strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya

Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Bidang Ketahanan Pangan dimana berperan dalam menjamin konsumsi pangan yang aman. Banyaknya ditemukan pemakaian residu, zat aditif dan zat berbahaya lainnya pada pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah. Untuk menjamin keamanan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak sekolah perlu dilakukan kerjasama antar sektor untuk melakukan uji terhadap pemakaian residu, zat aditif dan berbahaya lainnya. Keamanan pangan merupakan jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya pada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Betapapun terjadi peningkatan penyediaan pangan, semua akan menjadi sia-sia

apabila tingkat kesehatan masyarakat justru menurun akibat mengonsumsi pangan yang tidak bermutu dan tingkat keamanannya tidak terjamin. Oleh karenanya keamanan pangan merupakan syarat penting yang harus melekat pada pangan yang hendak dikonsumsi oleh manusia. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan mulai dari on farm sampai pangan siap diedarkan. Untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan segar, perlu koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu, serta advokasi kepada pemangku kepentingan. Praktek penanganan pangan harus diterapkan di setiap rantai pangan. Pembinaan keamanan pangan dilaksanakan mulai dari proses budidaya dengan menerapkan praktek budidaya pertanian yang baik atau *Good Agricultural Practices (GAP)* agar menghasilkan pangan bermutu, aman dan layak dikonsumsi, cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik atau *Good Halding Practice (GHP)*. Begitu juga dalam pengolahan pangan, keamanan pangan dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Manufacturing Practices (GMP)*. Demikian halnya pada rantai distribusi dan retail, keamanan pangan segar dapat dilaksanakan dengan menerapkan *Good Distibution Practices (GDP)* dan *Good Retail Practices (GRP)*.

2. Tingginya fluktuasi harga pangan yang dibutuhkan masyarakat

Tingginya fluktuasi harga pangan yang terjadi di dalam negeri, mendorong Pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan nasional yang bertujuan untuk menstabilkan harga serta mengurangi dampak negatif yang diterima oleh produsen sekaligus konsumen. Fluktuasi harga yang ditunjukkan oleh nilai Coeffisien Variation (CV). Nilai CV harga yang tinggi menunjukkan bahwa harga jual bersifat fluktuatif dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap inflasi.

3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat pada pangan pokok beras

Kesadaran tentang pentingnya upaya diversifikasi pangan telah lama dilaksanakan di Indonesia, namun demikian hasil yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Kebijakan diversifikasi pangan diawali dari Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (UPMMR), dengan menggalakkan produksi telo, kacang dan jagung yang dikenal dengan tekad, sampai yang terakhir adanya Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Walaupun telah berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan berbagai kalangan terkait, namun pada kenyataannya tingkat konsumsi masyarakat masih tertumpu pada pangan utama beras. Hal itu diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber bahan pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Dikaitkan dengan potensi yang ada, Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat kaya. Ironisnya, tingkat konsumsi sebagian penduduk Indonesia masih dibawah anjuran pemenuhan gizi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan pangan dan gizi keluarga dapat dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia maupun yang dapat disediakan di lingkungannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola oleh rumah tangga.

4. Masih banyak wilayah rawan pangan/penduduk miskin

Rawan pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung lapar atau gizi buruk. Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis”. Kerawanan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). Kerawanan Pangan Kronis adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.

Salah satu penyebab utama kerawanan pangan adalah kemiskinan yang berkepanjangan. Pendekatan yang dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan / rawan pangan adalah pemberdayaan masyarakat melalui : (1) pelatihan; (2) demplot; (3) pendampingan; (4) peningkatan akses untuk pengembangan kerjasama partisipasi inklusif; (5) peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan masyarakat, perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik; serta (6) peningkatan ketahanan pangan.

5. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal dan pentingnya mengkonsumsi menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Dengan berpedoman kepada Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka periode RPJMD tersebut merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD yang diarahkan kepada “mengembangkan sektor industri dan jasa (agroindustri dan pariwisata)” sebagai kelanjutan dari pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Agrobisnis memiliki peranan strategis dalam upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonomi, dan perbaikan perekonomian masyarakat pedesaan. Pengembangan Agrobisnis berbasis pangan lokal berbagai aspek perlu diperhatikan dalam upaya mengembangkan agroindustri berbasis pangan lokal. Ketersediaan bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal merupakan faktor utama. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah teknologi pengolahan, sumberdaya manusia dan pasar. Dari sisi kebijakan pemerintah dapat dilakukan dalam kegiatan resmi di daerah selalu disajikan makanan lokal, ini merupakan salah satu cara promosi yang bermanfaat bagi produsen. Makanan tradisional perlu terus dipromosikan di hotel, restoran, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. Festival masakan tradisional berbahan baku lokal perlu diadakan secara rutin di tiap daerah maupun tingkat nasional sebagai upaya promosi pangan lokal. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa manusia untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif memerlukan lebih dari 40 jenis zat gizi yang terdapat pada berbagai jenis makanan. Berkaitan dengan hal tersebut, penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Dalam rangka pengembangan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), dalam lima tahun kedepan akan dilakukan upaya-upaya diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengembangan budidaya berbagai jenis tanaman sesuai dengan kebutuhan keluarga seperti umbi-umbian, sayuran, buah, serta ternak dan ikan sebagai tambahan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga
- b. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan pangan segar untuk memenuhi persyaratan minimal keamanan pangan dan mutu pangan.
- c. Meningkatkan sosialisasi dan promosi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

6. Belum optimalnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten, pemerintah nagari dan kelembagaan cadangan pangan masyarakat

Cadangan pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga. Cadangan Pangan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari : (1) cadangan pangan pemerintah; (2) cadangan pangan pemerintah daerah; dan (3) cadangan pangan masyarakat. sedangkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintahan Nagari dilakukan melalui :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- b. Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari;
- c. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Nagari.

Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Nagari dan cadangan pangan masyarakat diarahkan pada :

- a. Cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar daerah (*Buffer Stock*);
- b. Cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan (*Buffer Stock*);
- c. Cadangan pangan untuk mengatasi guncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi defisit pangan tidak terduga (*Emergency Reserve*);

Cadangan pangan untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat karena bencana, dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan (*Food Aid Reserve*). Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari : cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Tujuan penyediaan cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kondisi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan atau keadaan darurat.

7. Belum optimalnya kerjasama sinergi diantara OPD terkait dalam mendukung Ketahanan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan

Membangun ketahanan pangan dan gizi sangat kompleks, memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran dalam mewujudkan kemandirian pangan guna ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga sampai perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif. Dalam rangka optimalisasi dan sinergisitas dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain 1) memperkuat kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mampu melahirkan kebijakan nyata dalam mewujudkan kemandirian pangan dan penanganan nagari-nagari rawan pangan, 2) mensinergikan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan dan gizi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran, 3) meningkatkan koordinasi dalam peningkatan penanganan keamanan pangan hasil tangkapan ikan, makanan jajanan anak sekolah dan pangan segar lainnya, 4) penguatan sistem informasi pangan dan gizi dalam rangka pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan telah disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/48/KPTS/PANGAN/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Visi, misi, agenda dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, dan tujuan serta sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. V i s i

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”.

Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.

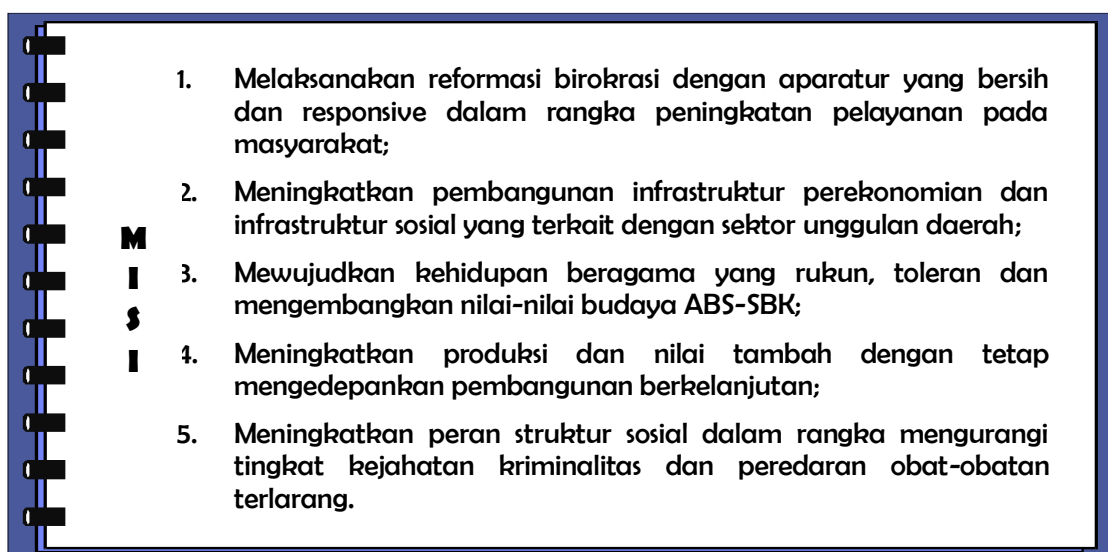
Unggul adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.

Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.

Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan meningkatkan daya beli manusia.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 
1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsive dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah;
 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK;
 4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan;
 5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

2.1.3. Agenda dan Prioritas Pembangunan

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan	Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan
		2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan

2.2 PERJANJIAN KINERJA DINAS PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah yang telah ditetapkan berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 adalah perwujudan kewajiban Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran

strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2018		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan						
Tujuan : Mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan						
1.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Tingkat Ketersediaan Pangan Utama	kg/kapita/tahun	137	143,02	104,39
2.	Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan	Tingkat Konsumsi Pangan				
		a. Konsumsi Energi	kkal/kapita/hari	2.247	2.326	103,52
		b. Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	60	61,78	102,97
	Rata-rata capaian					103,63

Dari tabel 3.2.1. dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator yang ditetapkan terlihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat baik.

Dari tabel 3.2.1 dapat dilihat, capaian rata-rata 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebesar 103,63 . Capaian indikator kinerja terendah yaitu tingkat konsumsi protein sebesar 102,97%.

3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan uraian pencapaian tujuan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian misi yang ke 4 yaitu:

Misi 4 Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Dengan Tetap Mengedepankan*.

Pada misi ini terdapat tiga kata kunci yaitu (1) Peningkatan produksi; (2) peningkatan nilai tambah; dan (3) pembangunan berkelanjutan. Peningkatan produksi yang dimaksud dalam misi ini adalah peningkatan produksi pertanian/perkebunan, perikanan dan kelautan, serta peternakan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan petani dan nelayan. Upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dapat dicapai melalui pemanfaatan faktor-faktor produksi secara efisien dan skala ekonomi, diantaranya dengan cara; (1) Intensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah faktor-faktor produksi yang digunakan; (2) Ekstensifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara menambah jenis dan keanekaragaman produksi; dan (3) Diversifikasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) Rasionalisasi, yaitu meningkatkan produksi dengan cara meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Untuk mewujudkan misi 4, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Selanjutnya uraian pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaian sasaran strategis secara sistematis disajikan sebagai berikut:

Tujuan : mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung kemandirian pangan

Indikator kinerja tujuan adalah skor pola pangan harapan dengan formulasi:

$\text{Skor pola pangan harapan} = \text{persentase energi dari kelompok pangan (sembilan kelompok pangan)} \times \text{bobot}$
--

Langkah-langkah menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut :

1. Mengelompokkan jenis pangan ke dalam delapan kelompok pangan.
2. Menghitung jumlah energi masing-masing kelompok pangan dengan DKBM (Daftar Komposisi Bahan Makanan)
3. Menghitung persentase masing-masing kelompok pangan terhadap total energi per hari.
4. Skor PPH dihitung dengan mengalikan persen energi dari kelompok pangan dengan bobot.

Sembilan kelompok pangan antara lain : padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah dan biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain.

Pada tahun 2016, skor pola pangan harapan adalah 72,9% dengan target 78%, tahun 2017 meningkat menjadi 76,5% dengan target 79%, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 80,5 dengan target 80%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian masih kurang dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kelompok padi-padian merupakan penyumbang tertinggi untuk konsumsi energi. Khusus kelompok padi-padian, diharapkan masyarakat dapat mengurangi konsumsi padi-padian dan dapat menggantinya dengan umbi-umbian. Namun dari dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan kontribusi energi dan padi-padian. Pada beberapa kelompok pangan terjadi peningkatan skor pola pangan harapan dari tahun 2016 yaitu kelompok pangan hewani sebesar 13,6 meningkat menjadi 15,5, sedangkan tahun 2018 menjadi 16,7. Pada kelompok kacang-kacangan, dimana pada tahun 2017 sebesar 3,1 meningkat menjadi 3,7 dan masih jauh dibawah skor maksimum PPH yaitu 10,0. Pada kelompok sayur dan buah tahun 2016 sebesar 22,3 dan tahun 2018 sebesar 23,4, dan tahun 2018 sebesar 25,9.

Pada tahun 2018 skor pola pangan harapan 80,5 terjadi peningkatan dibanding tahun 2017 skor pola pangan harapan 76,5 atau sebesar 4%. Hal ini dimungkinkan adanya perbedaan jumlah komoditi pangan yang dikonsumsi rumah tangga yang disurvei pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Seperti pada kelompok sayur dan buah ada beberapa komoditi terinci pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terinci dikelompok lainnya. Beberapa komoditi tersebut yaitu wortel dan ketimun. Khususnya komoditi petai dan jengkol. Dan kelompok buah adalah buah dan sawo, begitu juga dengan protein hewani seperti daging kambing.

Pada beberapa kelompok pangan seperti padi-padian, minyak dan lemak dan buah/biji berminyak masih perlu untuk penurunan konsumsi untuk kelompok tersebut, hal ini terlihat dari skor PPH dengan Angka Kecukupan Energi masih diatas skor maksimal PPH. Sementara pada pangan hewani masih rendah yaitu tahun 2017 dengan skor 13,6 meningkat pada tahun 2018 menjadi 15,5. Namun belum sesuai dengan target yaitu 24. Kelompok pangan kacang-kacangan masih perlu peningkatan dari 3,7 pada tahun 2018 , konsumsi idealnya pada skor 10. Kelompok pangan umbi-umbian masih dibawah target tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan, sementara konsumsi ideal adalah skor 2,5. Kelompok pangan sayur dan buah juga masih dibawah target dan terjadi peningkatan konsumsi pada tahun 2018 dari 22,3 menjadi 23,4. Sementara konsumsi ideal pada skor 30,0.

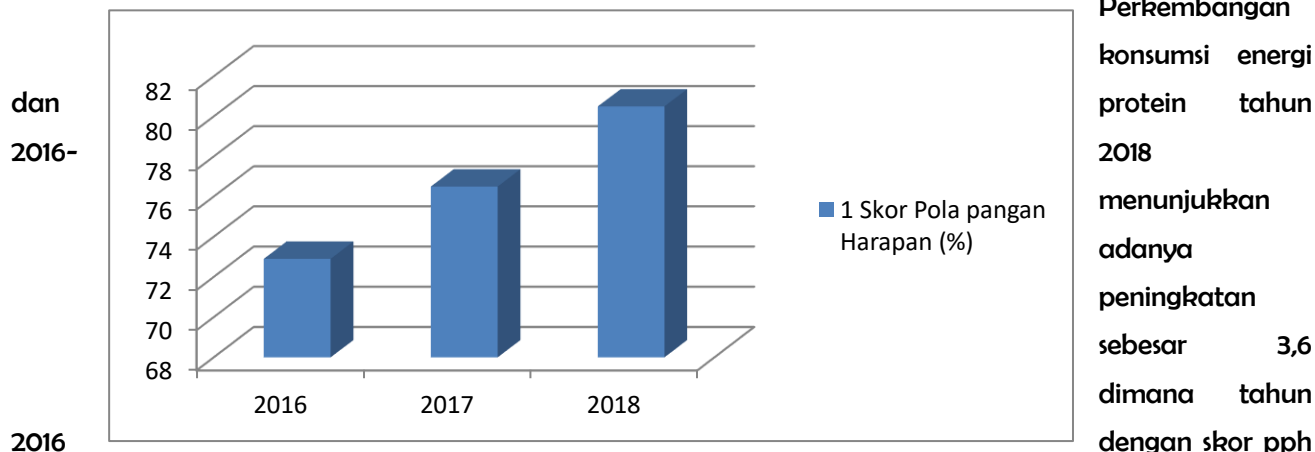
Tingginya konsumsi kelompok padi-padian khusus beras, kemungkinan disebabkan oleh pola makan masyarakat yang masih tergantung pada beras sebagai sumber energi dan didukung oleh produksi dan ketersediaan beras yang cukup tinggi, sedangkan konsumsi 8 (delapan) kelompok 8 (delapan) kelompok pangan lainnya baik kuantitas, kualitas maupun tingkat keragamannya relatif masih rendah jika dibandingkan dengan standar konsumsi pangan nasional, hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal seperti bahan pangan yang relatif masih dan rendahnya daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya perkembangan skor pola pangan harapan dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perkembangan skor pola pangan harapan tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018

1.	Skor Pola Pangan Harapan	72,9	76,5	80,5
----	--------------------------	------	------	------

Grafik 1. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016-2018



dan tahun 2016-2016 dengan skor pph 72,9 dan tahun 2017 dengan skor pph 76,5, sedangkan tahun 2018 dengan skor 80,5. Diharapkan untuk tahun berikutnya terjadi peningkatan target hingga skor 82 dapat tercapai. Hal ini guna mendukung sasaran pembangunan nasional di bidang pangan dan gizi adalah terwujudnya ketahanan pangan dan gizi pada tingkat rumah tangga yang tercermin pada ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, hasil yang akan dicapai ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan

1. Tingkat ketersediaan pangan utama

Formulasi tingkat ketersediaan pangan utama :

$$\text{Tingkat ketersediaan pangan utama} = \frac{\text{Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1. terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

Adapun capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Capaian Indikator kinerja sasaran strategis 1.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat ketersediaan pangan utama	kg/kapita/tahun	137	143,02	104,39
Rata-rata capaian					104,39

Dari tabel diatas terlihat bahwa ketersediaan pangan utama sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Ketersediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Kondisi ketersediaan pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 yang berasal dari produksi sebesar 109.016 ton ditambah dengan impor sebesar 137 ton dikurangi ekspor sebesar 45.402 ton. Setelah dikalkulasikan maka jumlah ketersediaan pangan utama untuk dikonsumsi adalah sebesar 65.401 ton.

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan di suatu daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Neraca Bahan Makanan". Dalam rangka penyusunan program pembangunan ketahanan tersebut, maka diperlukan analisis situasi pangan yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makanan.

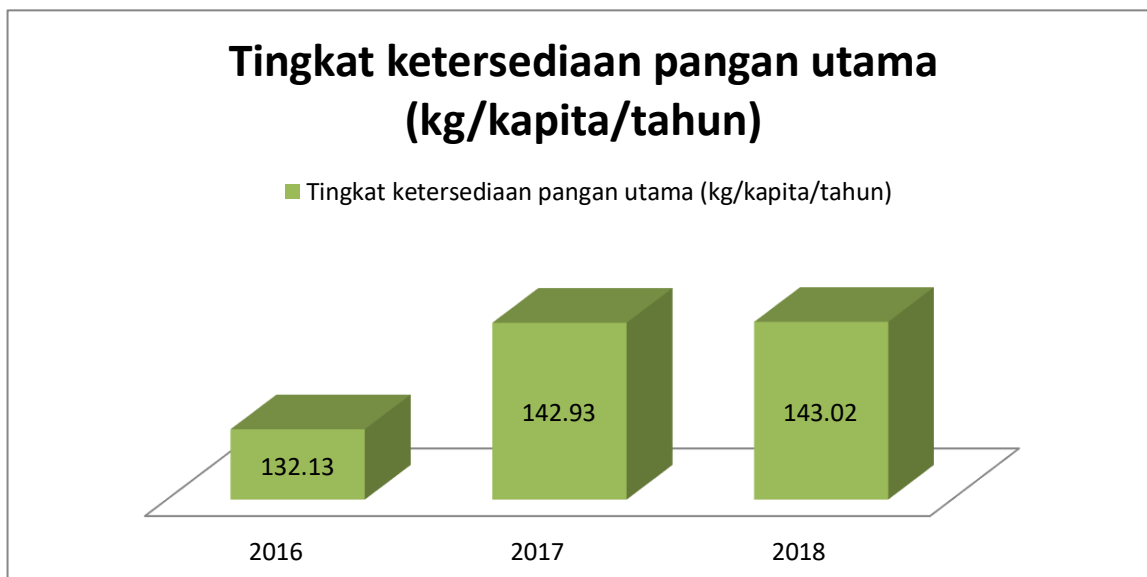
Berikut perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini :

Perkembangan tingkat ketersediaan pangan utama Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Tingkat ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	132,13	142,93	143,02

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan pangan utama dari tahun 2016-2018.

Grafik 2. Perkembangan Tingkat Ketersediaan pangan utama Tahun 2016-2018



Data Ketersediaan pangan utama diperoleh melalui analisa neraca

bahan makanan. Situasi ketersediaan pangan untuk menggunakan Tabel Neraca Bahan Makanan (NBM). Melalui NBM dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan dalam periode tertentu (defisit atau surplus), baik ketersediaan dalam jumlah (volume) yang dinyatakan dalam satuan kilogram/kapita pertahun. Dalam penyusunan NBM Kabupaten Pesisir Selatan secara umum mengacu pada metode penyusunan NBM yang disusun oleh Tim NBM Pusat dan khusus untuk angka rendemen, kebutuhan bibit,

pakan ternak, tercecer memakai angka ketetapan nasional dan angka yang disepakati di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pencapaian target sasaran strategis 1.1. didukung oleh :

1. Data produksi dari penyuluh pertanian di lapangan yang digunakan untuk perhitungan ketersediaan pangan utama.
2. Jumlah penduduk juga mempengaruhi ketersediaan pangan untuk dikonsumsi.

Faktor keberhasilan :

1. Tersedianya lahan luas yang potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan.
2. Iklim dan cuaca secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi hasil sumber daya pangan.
3. Tingginya jumlah produksi yang memungkinkan meningkatnya ketersediaan pangan.
4. Adanya penyuluh yang membantu dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi
5. Teknologi yang diterapkan dalam membantu meningkatkan produksi .
6. Infrastruktur yang memudahkan pendistribusian hasil pangan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain.

Hambatan dan kendala yang dihadapi :

1. Penyerapan pangan yang tidak maksimal yang belum mampu mencapai ketahanan pangan meskipun telah mencapai surplus pangan.
2. Akses pangan masyarakat di beberapa daerah masih tergolong rendah.
3. Distribusi pangan yang belum merata dan belum terjangkau oleh konsumen.
4. Pengelolaan ketersediaan stock bahan pangan belum optimal.
5. Infrastruktur dan prasarana distribusi yang belum memadai.

Upaya yang dilakukan :

1. Mengaktifkan kembali fungsi lumbung pangan masyarakat untuk menjamin ketersediaan pangan di daerah rawan pangan dan masa paceklik serta sebagai sumber usaha masyarakat yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketersediaan pangan tingkat nagari.
2. Adanya koordinasi dengan penyuluh yang berperan untuk memberikan penyuluhan dan kepada petani, bagaimana cara mengolah lahan dan meningkatkan produksi serta produktifitas dengan menerapkan teknologi.
3. Mengaktifkan kembali fungsi lembaga masyarakat yang membantu dalam menyediakan pangan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 didukung oleh program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Penanganan daerah rawan pangan.
2. Pengembangan desa mandiri pangan.
3. Penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat.
4. Pemantauan produksi, jaringan distribusi, pasokan pangan dan HBKN.
5. Penguatan cadangan pangan pemerintah kabupaten.
6. Pengembangan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).
7. Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan.
8. Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan
9. Pengembangan usaha pangan masyarakat / TTI.

10. Analisis ketersediaan pangan berdasarkan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM).
11. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :

Foto 1. Pengambilan beras CPP Tahun 2018 untuk disalurkan ke daerah rawan pangan



Foto 2. Pelaksanaan Sekolah Lapangan pada Nagari Mandiri Pangan di Nagari Mandiri Pangan Sungai Tunu Utara Ranah Pesisir



Foto 3. Pembinaan Gapoktan pengelola Toko Tani Indonesia yang berfungsi sebagai usaha pangan masyarakat yang membantu menstabilkan harga pangan terutama beras.



Foto 4. Pembinaan kelompok lumbung pangan masyarakat agar tetap aktif menjalankan fungsinya dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat.



Foto 5. Pembinaan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ke Lumbung Pangan dalam rangka evaluasi perkembangan lumbung pangan masyarakat.



Adapun jumlah anggaran yang digunakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1.1 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
----	---------	---------------	----------------	---------

				(%)
1.	Meningkatkan ketersediaan pangan	473.976.520,-	467.122.640,-	98,55

Sasaran 2.1
Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja.

1. Tingkat Konsumsi pangan
 - a. Konsumsi energi
 - b. Konsumsi protein

Formulasi tingkat konsumsi pangan :

Tingkat konsumsi Energi	: <u>Jumlah energi rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)
Tingkat konsumsi protein	: <u>Jumlah protein rumah tangga per hari</u> Jumlah Angka Rumah Tangga (ART)

Capaian kinerja indikator sasaran strategis 2.1 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.1.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Konsumsi Pangan				
	a. Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2.247	2.326	103,52
	b. Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	60	61,78	102,97
Rata-rata Capaian					103,25

Dari tabel 2.1 dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2.1 sebesar 103,25 %. Pencapaian sasaran strategis 2.1 termasuk sangat baik dengan kategori sangat berhasil. Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018.

Tabel 2.1.
Perkembangan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Tingkat konsumsi pangan			
	a. Konsumsi energi (kkal/kapita/hari)	2.319,5	2.377,4	2.326
	b. Konsumsi protein (gram/kapita/hari)	59,2	63,0	61,78

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa perkembangan capaian konsumsi energi dan protein dari 9 kelompok pangan terjadi peningkatan selama kurun waktu tahun (2016-2018) dapat dilihat hasil sebagai berikut :

1. Konsumsi energi secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Konsumsi energi pada tahun 2016 sebesar 2.319,5 kkal/kapita/hari dan terjadi peningkatan

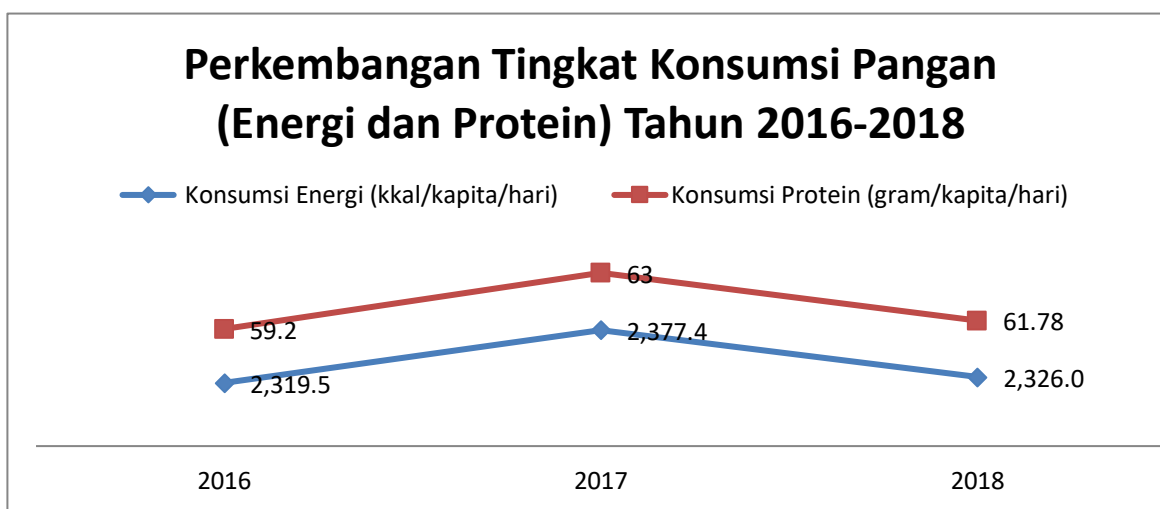
pada tahun 2017 menjadi 2.377,4 kkal/kapita/hari, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan konsumsi menjadi 2.326 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi lebih tinggi dari angka kecukupan energi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 2.150 kkal/kapita/hari.

2. Konsumsi protein secara keseluruhan dari ke 9 kelompok pangan dalam kurun waktu tahun tiga tahun terakhir yaitu tahun 2016 sebesar 59,2 gram/kapita/hari, tahun 2017 kembali terjadi peningkatan menjadi 63,0 gram/kapita/hari, sedangkan tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 61,78. Konsumsi energi ini lebih tinggi dari angka kecukupan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2012 yaitu 57 gram/kapita/hari.

Dari data konsumsi energi dan protein disebabkan oleh tingginya konsumsi pada kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, sedangkan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur harus ditingkatkan. Tingginya tingkat konsumsi beberapa kelompok pangan seperti padi-padian menunjukkan masih kurangnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang tinggi belum berimbang walaupun melebihi target yang ditetapkan. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar menggantinya dengan umbi-umbian dan meningkatkan konsumsi kacang-kacangan, pangan hewani, sayur dan buah untuk mencapai angka standar konsumsi energi dan protein.

Untuk melihat perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein dapat dilihat seperti grafik dibawah ini :

Grafik 2.1.1. Perkembangan Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein) Tahun 2016-2018



Faktor keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1

1. Produksi pangan yang tersedianya dalam jumlah yang cukup untuk dikonsumsi masyarakat
2. Penganeekaragaman pangan (diversifikasi pangan) melalui sosialisasi maupun penyuluhan bagi masyarakat untuk tidak bergantung pada satu sumber pangan memungkinkan masyarakat dapat menetapkan pangan pilihan sendiri.
3. Pemberdayaan kaum perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilannya dalam pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri.
4. Gerakan konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk dikonsumsi.

Hambatan yang dihadapi :

1. Jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan permintaan pangan lebih tinggi daripada ketersediaan.
2. Pola konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti gizi dan kesehatan.
4. Promosi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Strategi/Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan :

1. Meningkatkan produksi pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin meningkat.
2. Penyediaan suplai pangan dengan mengembangkan sumberdaya lokal yang dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal dan pengembangan makanan tradisional.
3. Meningkatkan promosi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.
4. Pembinaan kepada pedagang kecil guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2.1 didukung oleh program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Peningkatan dan pengembangan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan.
2. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.
3. Peningkatan penanganan keamanan pangan tingkat produsen dan konsumen.
4. Penyusunan pola pangan harapan.
5. Perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui dewan ketahanan pangan.
6. Teknologi pengolahan pangan lokal.
7. Model percontohan keamanan pangan.
8. Gerakan konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).
9. Pengawasan keamanan dan mutu pangan.
10. Penyusunan naskah akademis ketahanan pangan.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan :

Foto 1. Ajakan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui sosialisasi gerakan konsumsi B2SA tanggal 12 Maret 2018.



Foto 2. Sosialisasi kegiatan model percontohan keamanan pangan

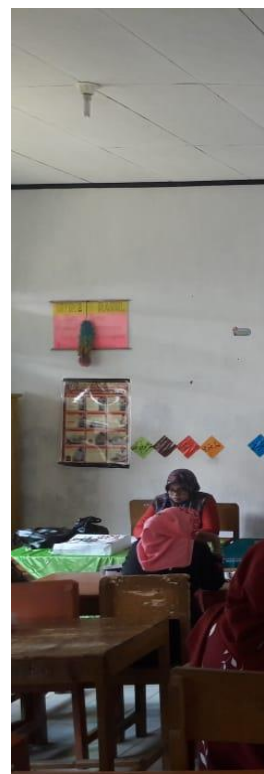


Foto 3. Pembinaan Kawasannya Rumah Pangan Lestari



Foto 4. Monitoring kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) ke KWT Bundo Saiyo Kecamatan Lengayang



Foto 5. Lomba cipta menu B2SA Tingkat Propinsi yang diselenggarakan di Kabupaten Dharmasraya



Foto 6. Lomba pengolahan pangan lokal Tingkat Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Dharmasraya



Foto 7. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2018



Foto 6. Penilaian Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Kabupaten Tahun 2018





Foto 8. Keikutsertaan pameran dalam peringatan HPS Tingkat Propinsi di Kabupaten Dharmasraya



Foto 9. Hasil Olahan Pangan Lokal (Susu Jagung) oleh KWT The Ampale Star Tahun 2018



Foto 10. Peninjauan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat ke Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) KWT Kelok Indah didampingi oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dan Pendamping.



Foto 11. Sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah



Foto 12. Pengambilan sampel jajanan anak sekolah untuk dilakukan uji labor keamanan pangan



Foto 13. Pengambilan sampel ikan segar untuk diuji keamanannya



Adapun program yang menunjang sasaran strategis 2.1 adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan anggaran dan realisasi seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1.1. Anggaran dan Realisasi Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan konsumsi pangan	1.075.190.353,-	978.989.840,-	91,05

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, tercantum pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2018		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	473.976.520,-	467.122.640,-	98,55
2.	Meningkatkan penganeekaragaman Konsumsi Pangan	1.075.190.353,-	978.989.840,-	91,05
Total		1.549.166.873,-	1.446.112.480,-	93,35

Dari tabel 3.4. diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 untuk menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 1.549.166.873,- terealisasi sebesar 1.446.112.480,- atau 93,35%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 2 (dua) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 103.054.393 atau secara absolut sebesar 6,65%
- b. Sisa anggaran sebesar 103.054.393,- disebabkan adanya efisiensi anggaran dengan mengurangi kegiatan yang tidak serta merta menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, yaitu :

1. Capaian sasaran

Dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100% atau lebih, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 104,39 dengan nilai tertinggi adalah 105,04% yaitu : tingkat konsumsi (a. Konsumsi energi, dan b. konsumsi protein). Sedangkan nilai terendah 102,97 yaitu konsumsi protein. Dari 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai dan melampaui target.

2. Capaian Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah sampai tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 1.446.112.480,- atau 93,35% dari target alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar 1.549.166.873,-. Dari 2 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah meningkatkan ketersediaan pangan sebesar 98,55% dan terendah adalah meningkatkan konsumsi pangan sebesar 91,05%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan, sehingga anggaran yang tersedia hanya terserap sebesar 91,05%.

3. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a. Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena pencapaian target kinerja tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.

- b. Perlu adanya sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan secara rutin untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang.
- d. Melakukan sinkronisasi kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah agar kegiatan bersifat terpadu dan terfokus kepada satu kawasan.

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 19700731 199403 1 004